



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 25 Februari 2020

Halaman: 1



Sultan Minta...

"Justru itu awal dari kesiapaan pemerintah daerah melayani publik, mestinya seperti itu," ucap Sultan.

Sultan menegaskan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mutlak harus lebih baik, sehingga tidak ada alasan lagi pelayanan harus menggunakan biaya tertentu. "Harus melayani lebih baik, gitu lho, enggak ada alasan lagi ya kan, dilayani harus minta bagian dari duit, enggak bisa, sudah enggak ada hal-hal seperti itu," ujarnya.

Ia menilai semakin tinggi penilaian kinerja mahajemen, pemerintah harus lebih siap memberikan layanan kepada publik. Jika tidak lebih baik, predikat nilai yang tinggi tersebut tidak ada artinya. Apalagi prinsip dari layanan pemerintah adalah untuk mengabdikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kalau saya makin tinggi itu manajemen pemerintahan itu harus makin siap. Bagaimana memberikan pelayanan kepada publik harus lebih baik. Kalau tidak lebih baik enggak ada artinya pemerintah daerah. Karena dasarnya kan mengabdikan untuk meningkatkan kesejahteraan, pelayanan dan sebagainya kepada publik," katanya.

Sultan mengungkapkan capaian DIY pada SAKIP ini didapat melalui proses yang panjang. DIY terus mengupayakan inovasi produktif yang mengedepankan aspek pelayanan dan berorientasi hasil. Hal itu karena membangun tata kelola pemerintahan memang membutuhkan proses yang harus konsisten dijalani. "DIY selalu mengupayakan efektivitas birokrasi melalui budaya pemerintahan yang peka terhadap perubahan, beradaptasi dengan teknologi informasi, dan melayani dengan sepenuh hati. Juga berintegritas kuat sehingga mampu menjauhkan dari perilaku korupsi," kata Sultan.

SAKIP yang andal, efektif dan

efisien, kata Sultan, mampu mewujudkan *good government and clean governance*. Diperlukan dukungan SDM yang profesional, beretos kerja tinggi serta memiliki moral yang baik. Untuk itu, DIY berkomitmen untuk terus berproses melakukan perubahan fundamental, struktural, dan kultural. Sultan menjelaskan SAKIP merupakan wujud dari penghargaan kepada masyarakat.

Setiap rupiah yang dikeluarkan masyarakat melalui pajak dan retribusi sudah seharusnya kembali kepada masyarakat. Pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan pemanfaatan rupiah tersebut sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. "Penyelenggaraan pemerintahan tanpa sistem akuntabilitas publik yang baik adalah kegagalan dalam menjalankan mandatori masyarakat," katanya.

Reformasi Birokrasi

Sultan berharap hasil evaluasi SAKIP ini mampu meneguhkan komitmen reformasi birokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. "Pemda harus bebenah untuk saling bekerja sama, bukan lagi sama-sama bekerja," ujar Sultan.

MenpanRB Tjahjo Kumolo mengungkapkan rasa bangganya atas prestasi yang dicapai DIY, yang mampu memangkas 3.000 program di tingkat provinsi menjadi 800 program. Pemangkasan tersebut mampu menghasilkan kualitas dan hasil yang diinginkan dengan lebih efektif dan efisien. Menurutnya, apabila seluruh daerah menerapkan seperti yang diterapkan DIY, efisiensi akan merata terwujud di Indonesia.

"Prestasi DIY harus ditiru oleh daerah-daerah lain. ASN harus profesional melaksanakan tugas tata kelola pemerintahan dengan baik. Seperti yang dilakukan DIY, perencanaan, anggaran

serta evaluasi harus dilaksanakan dengan optimal," ujar Tjahjo. Lebih lanjut Tjahjo mengungkapkan melalui SAKIP, instansi pemerintah harus fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional. Hal itu diwujudkan melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala.

Hasil evaluasi SAKIP pada 2019 menunjukkan perbaikan yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata hasil evaluasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota, rata-rata nilai hasil evaluasi meningkat dari 56,53 pada 2018, menjadi 58,97 pada 2019.

Sedangkan untuk tingkat provinsi, nilainya rata-ratanya meningkat dari 67,28 pada 2018 menjadi 69,63 pada 2019. Perbaikan hasil evaluasi tersebut juga sejalan dengan semakin besarnya potensi inefisiensi yang dapat dicegah oleh pemerintah daerah yang mengalami kenaikan kategori. Tercatat sebesar Rp41,15 triliun pada 2017 dan Rp65,1 triliun pada 2018 potensi pemborosan dapat dicegah. Sedangkan data sementara yang terkumpul pada 2019, potensi pemborosan yang dapat dicegah sebesar Rp5,7 triliun. "Implementasi SAKIP ini adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan pemerintah daerah semata. Oleh karenanya, Kementerian PANRB terus mendorong seluruh instansi pemerintah untuk tidak pernah berhenti berupaya meningkatkan kualitas implementasi SAKIP," katanya.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala BPKP RI, pejabat di lingkungan KemenPAN-RB, jajaran Muspida DIY, BKP, gubernur, bupati/wali kota se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Jawa Tengah, dan DIY.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			
3. Inspektorat			

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005